KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Gedung baru, kinerja melorot
Tanggal : Rabu, 06 Mei 2015
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : B8-B9

Gedung Baru, Kinerja Melorot

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali berencana membangun gedung baru di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Pusat. Gedung baru itu diharapkan menjadi ikon nasional. Namun, rencana itu mendapat penolakan keras dari sejumlah kalangan. Kinerja DPR belum sebanding dengan lokasi angaran yang dikeluarkan Negara bagi wakil rakyat yang terhormat itu. Mestikah gedung parlemen direnovasi di tengah kinerjanya yang masih melorot? Bagaimana tanggapan anggota dewan? Wartawan *SP* **Hotman Siregar** menganalisisnya dalam tulisan berikut.

Ketua DPR Setya Novanto dalam Pidato Penutupan Masa Sidang III 2014-2015, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (24/4) lalu mengatakan, pembangunan gedung baru itu sangat penting di tengah penguatan kelembagaan. Menurut politisi Partai Golkar itu, gedung yang ada saat ini tak mampu lagi menampung jumlah anggota DPR dan staf ahli yang terus bertambah.

"Dalam rangka penguatan kelembagaan, DPR membentuk Tim kerja Pembangunan Perpustakaan, Museum, Reseach Center dan Ruang Kerja Anggota dan Tenaga Ahli DPR RI yang sekaligus akan menjadi ikon nasional," kata Novanto.

Rencana serupa sebenarnya sudah dibatalkan pada era DPR periode 2009-2014. Namun, DPR periode 2014-2019 ini beralasan membangun gedung baru untuk perpustakaan, museum, pusat riset, dan ruang kerja untuk tenaga ahli dan staf anggota DPR yang jumlahnya semakin banyak.

Yang menjadi pertanyaan mestikah gedung DPR direnovasi atau dikembangkan mengingat kinerja parlemen masih melorot alias jauh dari harapan rakyat? Belum lagi dalam setahun lebih dari separuh waktu kerja anggota DPR di luar gedung alias reses.

Saat ini waktu kerja anggota DPR di gedung parlemen dalam membahas undang-undang hanya sekitar 5 bulan dalam setahun. Artinya, dengan jarangnya anggota DPR di gedung Senayan Jakarta apakah gedung baru masih diperlukan?

Parahnya lagi, rencana merampungkan 37 UU yang masuk dalam Prolegnas tahun ini diperkirakan tidak selesai karena waktu reses anggota dewan yang terhormat sangat terbatas. Pencapaian pembuatan dan revisi UU selalu tidak tercapai dalam masa tugas DPR.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku pesimistis pembahasan UU sebagaimana diamanatkan dalam prolegnas akan tercapai. DPR kini memiliki 11 komisi dan bila dibagi masing-masing pembahasan UU, tiap komisi seharusnya mampu menyelesaikan minimal 3 UU.

"Saya kira setiap tahun pembahasan UU itu pasti tidak tercapai. Saya pesimistis dan tidak yakin prolegnas yang direncanakan tercapai. Selama ini *kan* paling hanya 60% UU selesai dibahas," katanya di Jakarta, Senin (4/5).

Apa yang disampaikan Muzani merupakan gambaran kinerja DPR selama ini. Tugas pokok DPR di bidang legislasi cenderung terabaikan. Bahkan muncul rencana pembangunan gedung baru DPR.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, tim kerja yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal DPR dan pemerintah itu akan melakukan kajian. Jika hasil kajian menyatakan gedung baru tidak dibutuhkan, pembangunan bisa dibatalkan.

Padahal, anggaran untuk tahap awal pembangunan sudah tersedia tahun ini sebesar Rp 124 miliar. Menurut Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal DPR Djaka Dwi Winarko, anggaran itu bagian dari tambahan Rp 1,635 triliun untuk DPR yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

"Anggaran yang tersedia tahun ini untuk biaya perencanaan dan konsultasi tahap awal. Misalnya untuk membayar konsultan pembangunan," katanya.

Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti menyebutkan, pembangunan gedung baru DPR kali ini merupakan kebutuhan karena Gedung Nusantara I DPR sudah tidak memadai untuk menampung semua anggota DPR dan stafnya. Gedung yang dibangun tahun 1997 itu dibangun untuk ditempati 800 orang, yaitu 450 anggota DPR dan staf.

Namun, sekarang gedung ditempati 2.420 orang. Mereka itu terdiri dari 560 anggota DPR serta dua tenaga ahli dan satu staf pribadi.

Ke depan, tutur Winantuningtyastiti, jumlah tenaga ahli dan staf administrasi semuanya menjadi 4.357 orang. Ini karena ada penambahan jumlah tenaga ahli dan staf administrasi, sesuai revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Ia mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang pembangunan gedung negara, ruang kantor pejabat negara idealnya memiliki luas rata-rata 10 meter persegi. Kini, dengan penambahan tenaga ahli, ruang anggota DPR dikhawatirkan makin di bawah standar.

Revisi

Melalui revisi UU MD3 pada Desember 2014 dan perumusan Tata Tertib DPR 2014-2019, jumlah tenaga ahli anggota DPR bertambah dari dua menjadi lima orang. Staf administrasi yang sebelumnya satu orang, jadi dua orang.

Penambahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan. Namun sejumlah pihak menilai, DPR seharusnya melakukan perencanaan dan kalkulasi terlebih dahulu mengenai ketersediaan ruangan sebelum memutuskan menambah tenaga ahli.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, pokok masalah yang terpenting di DPR bukanlah menambah jumlah tenaga ahli. Namun lebih pada menciptakan pola perekrutan yang akuntabel sehingga bisa mendapatkan tenaga ahli dengan keahlian memadai.

Selama ini, perekrutan tenaga ahli jadi domain anggota DPR. Mereka secara pribadi memilih dan merekrut tenaga ahli masing-masing. Nama-nama itu berikutnya diajukan ke Sekretaris Jenderal DPR untuk dikeluarkan surat keputusan.

"Pada kenyataannya, perekrutan tidak selalu terbuka dan sesuai persyaratan. Sebagai contoh, aturannya, tenaga ahli dilarang memiliki hubungan darah dengan anggota DPR," katanya.

Untuk menyiasati aturan itu, lanjut Lucius, sejumlah anggota Dewan memakai sistem perekrutan silang. Ia mencontohkan, modus yang dilakukan keluarga dari anggota DPR A menjadi tenaga ahli untuk anggota DPR B dan sebaliknya.

"Akhirnya, sering kali kualifikasi, standar keahlian, dan persyaratan pendidikan dikesampingkan. Sulit menjamin seseorang benar-benar ahli jika perekrutannya bergantung pada subyektivitas anggota semata," tutur Lucius.

Lucius menilai, rencana pembangunan perpustakaan, museum dan pusat penelitian yang sepaket dengan gedung baru DPR hanya ajang cari proyek segelintir oknum wakil rakyat. Lucius berkaca pada fakta perpustakaan dan museum DPR saat ini tak terawat serta sepi pengunjung.

Ia menegaskan sinyalemen bahwa pembangunan fasilitas di DPR pertama-tama bukan karena desakan kebutuhan, bukan karena DPR membutuhkan perpustakaan dan *research centre*. Lucius menuding rencana pembangunan itu



Gedung Parlemen

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

memiliki motivasi awal adalah proyek.

Menurutnya, DPR memiliki alasan tersendiri di balik kengotan mewujudkan ambisi itu. Caranya dengan modus membangun perpustakaan dan museum dianggap paling bisa menjadi tameng untuk menutupi nafsu proyek sebagian anggota dewan.

"Jika saja DPR memang menunjukkan minat baca yang tinggi, perpustakaan baru dan mewah tidak harus disediakan terlebih dahulu. Pekerjaan membaca bagi yang suka membaca bisa dilakukan di mana saja dan dengan fasilitas apa saja. Minat baca ini yang minim pada sebagian besar anggota parlemen," tegas Lucius.

Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi menenggarai ada persekongkolan jahat yang dilakukan antar Pemerintah dan DPR merampok uang rakyat. Hal ini menurutnya bisa dilihat dari berbagai fakta saling mengamini di antara pemerintah dan DPR meskipun langkah masing-masing pihak jauh dari kata tidak prorakyat.

Menurut Uchok, semua langkah pemerintah saat ini diamini oleh DPR. Bahkan ketika harga BBM, listrik dan gas dinaikkan DPR terkesan diam saja.

"Padahal rakyat kini semakin terjepit atas kenaikan itu. DPR sama sekali tidak menyuarakan penderitaan rakyat akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok akibat kebijakan pemerintah ini," kata Uchok.

Dia pun mensinyalir ada modus baru dalam merampok uang rakyat dan perampokan uang rakyat yang tidal lagi menggunakan cara-cara konvensional, tapi sudah menggunakan metode-metode terbaru saat ini. Perampokan tidak lagi menggunakan cara menaikkan harga proyek dari nilai sesungguhnya dari anggaran yang ada tapi sudah mengambil langsung dari kantong rakyat.

Dikatakan, dulu penguasa merampok uang rakyat dengan cara menaikan anggaran yang tidak sesuai fakta. Kini perampokan langsung diambil dari kantong rakyat.

"Contohnya yah rakyat dipaksa membeli BBM, listrik dan gas dengan harga tinggi. Untungnya dua kali. *Pertama*, uang subsidi tidak jelas digunakan untuk apa, karena *toh* sudah beberapa bulan subsidi dicabut dan harga BBM, gas dan listrik naik, tapi tidak ada manfaat berarti yang dinikmati rakyat. *Kedua*,rakyat membayar lebih mahal dari harga yang sesungguhnya karena monopoli para pengambil kebijakan," tambahnya.

Sementara Politisi Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyatakan, Fraksinya masih akan meneliti terlebih dulu rencana pembangunan gedung DPR tersebut. Gerindra harus terlebih dulu memahami secara detail rencana pembangunan itu.

"Dengan memahami ini kita akan memberikan persetujuan kalau menunjang efektivitas parlemen. Kalau tidak, kita bisa saja tidak akan mendukung," kata Desmond.

Saat ini, kata Desmond, yang menjadi persoalan apakah kebutuhan wakil rakyat atau kebutuhannya pimpinan DPR. Ketua DPR harus bisa menjaga posisi pimpinan wakil-wakil rakyat.

"Posisi kami sama saja dengan ketua DPR. Kalau dia anggap beda baca dulu UU MD3. Kalau dia kebablasan agak aneh juga. Dalam konteks yang diperhatikan itu kepentingan DPR sendiri. Apakah DPR sudah memberikan kontribusi yang baik belum?" Katanya.

Gerindra, lanjut Desmond, mau menunjukkan rencana pembangunan gedung DPR bukan akal-akalan anggota DPR di mata masyarakat. Ia mengingatkan jangan sampai rencana pembangunan ini menjadi proyek akal-akalan.

"Harus disosialisasikan dulu gagasan ini. Jadi, harus diketahui dulu oleh masyarakat. Bagian yang harus disikapi pimpinan DPR," ucapnya.

Ikon Nasional

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menyatakan, DPR terus berupaya mewujudkan rencana pembangunan gedung baru yang ditargetkan akan menjadi salah satu ikon nasional. Karenanya, masa reses DPR kali ini pun akan dimanfaatkan untuk sosialisasi pembangunan gedung baru ke masyarakat.

"Masa reses kali ini tidak hanya dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi konstituen. Wakil rakyat juga akan menyampaikan rencana pembangunan gedung baru DPR," katanya.

Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, DPR dalam masa reses ini akan sebanyak mungkin menyerap pendapat publik tentang rencana pembangunan gedung baru untuk wakil rakyat uang terhormat itu. Melalui sosialisasi itu, lanjutnya, akan terlihat apakah rakyat menyetujui atau mengoreksi.



FOTO-FOTO:DOK SP

Setya Novanto

"Silahkan sampaikan kepada anggota dewan. Sebagai wakil rakyat, mereka pasti akan dengarkan suara rakyat yang diwakilinya. Kalau tidak, pasti pada pemilu 2019 rakyat tidak akan memperca-yainya," ujarnya.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) secara tegas menolak rencana pembangunan gedung baru DPR itu. Fitra melihat rencana pembangunan gedung baru yang juga sempat ditolak pada 2010-2011 lalu.

Sekjen FITRA Yenny Sucipto mengatakan, nyaris tak ada perbedaan antara proyek gedung baru DPR 2010 dan 2015. Pada 2010, terdapat tiga pelanggaran administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/prt/m/2007 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara.

Selain itu, harga tidak sesuai dengan standar Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) harus *multiyear*. Tak hanya itu, potensi *markup* hampir 50% yaitu sekitar Rp 605 miliar.

Saat ini, sambung Yenny, masalahnya sama dengan 2010. Pertama, ada manipulasi perencanaan pembangunan dan anggaran. Kedua, menyalahi aturan Kementerian PU dan Kemenkeu. Ketiga, potensi markup tinggi. Keempat, sumber dananya tidak jelas.

"Menolak Rencana Pembangunan Gedung DPR karena tidak ada di anggaran APBN-P 2015. Rencana ini bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang terkena dampak pemangkasan subsidi energi," kata Yenny

Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menyatakan bahwa fraksinya belum pernah diajak bicara soal rencana pembangunan gedung baru DPR sebagaimana klaim Ketua DPR Setya Novanto.

Bambang mengaku rencana pembangunan gedung DPR itu belum disampaikan pimpinan DPR ke fraksi. Hanya saja, anggota Komisi Bambang menilai rencana pembangunan gedung baru beserta perpustakaan, laboratorium hingga *research center* yang akan dijadikan ikon nasional merupakan ide yang baik.

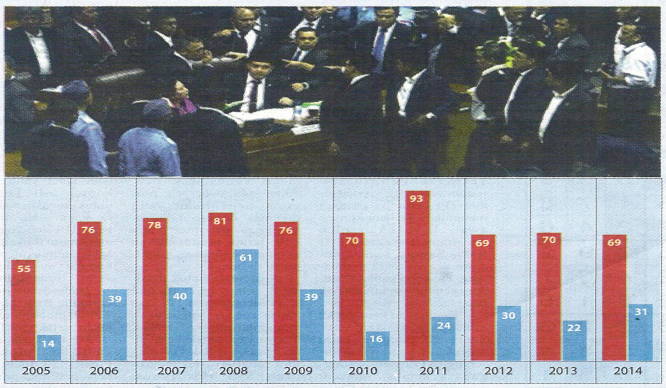
"Sudah sewajarnya DPR juga punya karya yang dikenang di kemudian hari. Itu ide baik baik saja. Karena menciptakan sesuatu yang monumental. Zaman Novanto apa, Marzuki (ketua DPR 2009-2014) apa, mereka juga kan pengin dikenang, nanti anak cucunya bangga," ujar Bambang.

Bambang mengaku bisa memahami kegundahan masyarakat yang menolak gedung baru DPR. Sebab, hal yang selalu jadi sorotan adalah biaya pembangunan dan kontraktor yang akan mengerjakannya.

"Cuma banyak yang gak percaya DPR jumlah dananya dan kontraktor siapa. Mari kita awasi bareng-bareng. Ini cara pandang pimpinan bisa berbeda dalam melihat momentum. Saya kira gak sampai triliunan," katanya.

Rencana pembangunan gedung sudah disuarakan oleh para anggota Dewan Terhormat saat era Presiden SBY atau DPR di bawah Marzuki Ali pada 2010 hingga 2011. Namun, saat itu rencana pembangunan gedung baru yang diperkirakan menghabiskan dana Rp 1,1 triliun dibatalkan oleh Menteri Keuangan. ◆

Data Pencapaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2005-2014:



Catatan: Untuk 2015, DPR telah menetapkan target prolegnas sebanyak 160 RUU dengan prioritas pada 35 RUU.

Sumber: PSHK

Foto: ISTIMEWA